

Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Fatkhul Arifin*, Asep Supena, Yufriati

Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding Author: fatkhul-9919922001@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Government regulations require that every school accept children with special needs at least 10% of the number of enrolled students. Of course there must be readiness from the school, both from the readiness of teachers, facilities and curriculum in learning. The purpose of this study was to find out how far schools are ready to implement inclusive education in elementary schools. The research method used in this research is qualitative descriptive analysis. The sample used in this study was one of the public elementary schools in the Depok area. Instruments used in the form of observation, interviews and documentation. The data obtained is then described and studied in more depth by linking theories related to inclusive education. The results showed that the implementation of the inclusive education program was going well. The admissions process is carried out by strict selection, learning is carried out with adjusted media and teaching materials for ABK, the assessment instrument used is designed for ABK students. So the conclusion from this study is that the implementation of the inclusive education program implemented in state elementary schools is well implemented, it's just that it needs support from all parties, especially the government which facilitates schools for inclusive education, the number of special accompanying teachers and of course parents.

Keywords: Educational Practice; Inclusive Education; The child with special needed; Special Assistance Teacher

Abstrak

Peraturan pemerintah mengharuskan setiap sekolah menerima anak berkebutuhan khusus setidaknya 10% dari jumlah penerimaan siswa. Tentu harus ada kesiapan dari sekolah, baik dari kesiapan guru, fasilitas dan kurikulum dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah dalam melaksanakan Pendidikan inklusi di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif analisis dekriptif. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Depok. Instrumen yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dideskripsikan dan dikaji lebih mendalam dengan mengaitkan teori terkait dengan Pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendidikan inklusi berjalan dengan baik. Proses penerimaan dilakukan dengan seleksi yang ketat, pembelajaran dilaksanakan dengan media dan bahan ajar ABK disesuaikan, instrument penilaian yang digunakan dirancang untuk siswa ABK. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program Pendidikan inklusi yang dilaksanakan pada sekolah dasar negeri dilaksanakan dengan baik, hanya saja butuh dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah yang memfasilitasi sekolah untuk Pendidikan inklusi, jumlah guru pendamping khusus dan tentunya orang tua.

Kata Kunci: Prakti Pendidikan; Pendidikan Inklusi; Anak berkebutuhan khusus; Guru Pendamping Khusus

Article History:

Received 2022-12-21

Revised 2023-02-24

Accepted 2023-03-02

DOI:

10.31949/educatio.v9i1.4191

PENDAHULUAN

Pendidikan sejatinya adalah hak dari semua masyarakat Indonesia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (*UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.). Disebutkan bahwa Pendidikan wajib dilaksanakan minimal 9 tahun bagi anak Indonesia. Ini artinya setiap lembaga wajib memfasilitasi dan menerima siswa untuk belajar tanpa terkecuali di dukung oleh pemerintah baik dalam pemenuhan tenaga pendidik, fasilitas dan sarana dan prasarana. Hak Pendidikan tentu bukan hanya untuk anak yang normal, namun juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut peraturan pemerintah, sekolah negeri wajib menerima siswa yang berkebutuhan khusus atau sekolah negeri diharuskan menjadi sekolah inklusi.

Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus menjadi problem bagi sebagian guru. Tentu ada alasannya jelas karena tenaga pendidik untuk anak yang berkebutuhan khusus masih minim. Selain itu fasilitas, sarana dan prasarana juga harus mendukung. Dari beberapa informasi pelaku pembelajaran, guru pendamping khusus (GPK) belum jelas statusnya dalam kepegawaian. Setiap tahunnya tidak ada formasi khusus yang menempatkan GPK sebagai pegawai negeri sipil di sekolah dasar negeri. Ini tentu menjadi berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah yang terdapat anak berkebutuhan khusus. Keberadaan GPK tentu sangat penting bagi Pendidikan inklusi, tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menempatkan GPK dengan status yang jelas melalui pengangkatan pegawai negeri sipil di sekolah dasar negeri.

UNESCO merekomendasikan lembaga Pendidikan untuk memperkuat guru inklusi (Acedo, 2011), diantaranya: 1) Memperkuat peran guru dengan bekerja untuk meningkatkan status dan kondisi kerja mereka, dan mengembangkan mekanisme untuk merekrut calon yang cocok, dan mempertahankan guru yang memenuhi syarat yang peka terhadap persyaratan pembelajaran yang berbeda, 2) Melatih guru dengan memperlengkapi mereka dengan keterampilan dan materi yang sesuai untuk mengajar populasi siswa yang beragam dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari berbagai kategori siswa melalui metode seperti pengembangan profesional di tingkat sekolah, pelatihan pra-jabatan tentang inklusi, dan instruksi yang memperhatikan perkembangan dan kekuatan dari individu pembelajar. 3). Mendukung peran strategis pendidikan tinggi dalam pelatihan prajabatan dan profesional guru tentang praktik pendidikan inklusif antara lain melalui penyediaan sumber daya yang memadai. 4). Mendorong penelitian inovatif dalam proses belajar mengajar yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. 5). Membekali administrator sekolah dengan keterampilan untuk menanggapi secara efektif kebutuhan yang beragam dari semua peserta didik dan mempromosikan pendidikan inklusif di sekolah mereka, dan 6). Mempertimbangkan perlindungan peserta didik, guru, dan sekolah pada saat konflik.

Dari kriteria diatas, Praktik penerapan Pendidikan inklusi di Indonesia faktanya belum sesuai dengan harapan, hal ini dijelaskan pula oleh Darma bahwa pada kenyataan penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesiamasih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan dan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, dukungan orang tua dan masyarakat.(Darma & Rusyidi, n.d.). Praktik dilapangan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diterima belum sesuai dengan kebijakan dalam hal penerimaan jenis kekhususan yang tidak dibatasi tingkat kecerdasan (Praptiningrum, 2010). Tingkat kecerdasan siswa berkebutuhan yang masih di bawah rata-rata, belum ada penentuan batas jumlah siswa yang diterima serta belum adanya syarat rekomendasi tertulis dari pihak sekolah dan belum memiliki sarana dan prasarana khusus(Lanham, 2014; Rahim, 2016).

Sekolah inklusif menerima dan mengintegrasikan semua siswa di kelas utama, terlepas dari kebutuhan pendidikan khusus mereka (Perrin et al., 2021). Ini menyiratkan bahwa kurikulum pengajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut, tetapi juga praktik guru akan beradaptasi, sehingga semua siswa dapat mencapai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan (Marope, 2017).

Pendidikan inklusi dipahami oleh Sebagian masyarakat adalah sekolah yang didalamnya terdapat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Khaerudin Pendidikan inklusi dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi(Khairuddin, 2020). Pendidikan inklusif mengacu pada pendidikan semua anak dalam satu ruang kelas, terlepas dari kondisi kognitif atau fisiologis mereka (Dignath et al.,

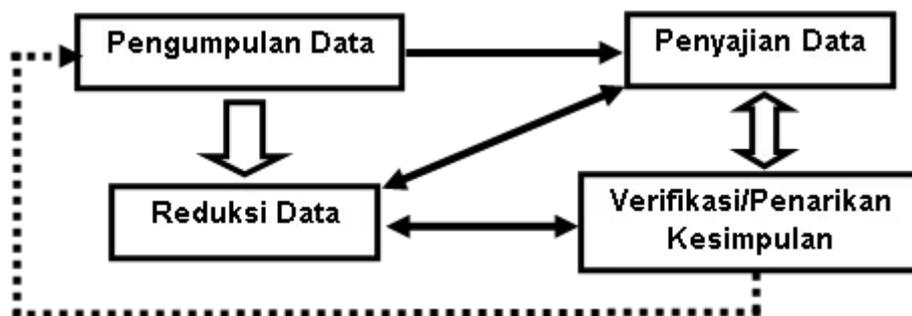
2022). Pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai prinsip panduan untuk mencapai tingkat integrasi sekolah yang wajar bagi semua siswa. Dalam konteks visi integrasi yang lebih luas, pendidikan inklusif menyiratkan konsepsi dan penerapan berbagai strategi pembelajaran untuk merespons secara tepat keragaman peserta didik. (Operti & Belalcázar, 2008; Patera, 2021). Makna inklusi ditentukan secara budaya dan pada dasarnya tergantung pada nilai-nilai politik dan proses negara untuk pemberlakuannya (Engelbrecht, 2006a; Kellmer Pringle, n.d.). Di banyak negara, pendidikan inklusif masih dianggap sebagai sebuah pendekatan untuk melayani anak-anak penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan umum (Ydo, 2020). Sesuai arahan yang diberikan oleh konferensi International Bureau of Education (IBE) UNESCO pada tahun 2008, bagaimanapun, ini semakin dilihat secara lebih luas sebagai prinsip yang mendukung dan menyambut keragaman di antara semua pelajar (Ydo, 2020). Artinya, tujuannya adalah untuk menghilangkan eksklusi yang merupakan konsekuensi dari sikap dan tanggapan terhadap keragaman ras, kelas sosial, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status migran, dan kemampuan.

Di beberapa negara sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang penerapan Pendidikan inklusi, diantaranya penerapan Pendidikan inklusi di afrika selatan (Engelbrecht, 2006a, 2006b), Penerapan Pendidikan inklusi di Beijing (Lanham, 2014) dan penerapan Pendidikan inklusi di Indonesia (Darma & Rusyidi, n.d.). Selain praktik Pendidikan inklusi, penelitian yang terkait bagaimana persiapan guru dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi juga diteliti di beberapa negara diantaranya penelitian yang dilakukan (Amr, 2011) menjelaskan apa yang harus disiapkan bagi guru untuk Pendidikan inklusi, Kesiapan guru inklusi di Eropa (Donnelly & Watkins, 2011), dan kesetaraan pendidikan inklusi (Ainscow, 2020).

Dari sekian banyak penelitian diatas, Pendidikan inklusi masih menjadi isu hangat di setiap negara bukan hanya di Indonesia. Populasi anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia masih tinggi. Menko PKM (Muhajir Effendi) mengatakan bahwa data statistik membuktikan bahwa populasi disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. (Novrizaldi, 2022). Dari data tersebut penulis meyakini bahwa penelitian terkait judul sangat penting dikaji lebih dalam, karena pada praktiknya Pendidikan inklusi di Indonesia sesuai. Sehingga peneliti memberikan beberapa pertanyaan penelitian terkait dengan hal tersebut: Bagaimana Penerapan praktik Pendidikan inklusi di Sekolah Dasar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber. Teknik pengumpulan data juga bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.



Gambar 1. Alur penelitian

Instrument dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi seputar penerimaan, proses pembelajaran, Teknik penilaian, dan kelulusan bagi siswa berkebutuhan khusus. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala sekolah

dan guru pendamping khusus (GPK) secara mendalam. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa kegiatan belajar, ruang belajar, media pembelajaran, dan dokumen-dokumen terkait.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru pendamping khusus (GPK) dan dikembangkan secara lebih mendalam, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan Pendidikan inklusi di sekolah dasar.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar negeri di wilayah Depok. Sumber yang kami wawancarai adalah kepala sekolah dan guru yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau guru pendamping khusus (GPK). Terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus, kami memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penerimaan, proses pembelajaran, penilaian, media yang digunakan, dan proses kelulusan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

1. Proses Penerimaan Murid Baru

Setiap tahunnya sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB), peserta didik yang mendaftar Sebagian besar dari wilayah sekitar. Pemerintah melalui peraturan Menteri mewajibkan sekolah menerima siswa yang berkebutuhan khusus, sedikitnya 10% dari total siswa yang mendaftar. Hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa, setiap tahunnya menerima lebih kurang 112 peserta didik. Namun karena keterbatasan guru pendamping khusus (GPK) maka sekolah hanya menerima sekitar 5 sampai dengan 8 anak saja yang diseleksi berdasarkan kriteria anak berkebutuhan khusus (ABK). Apakah pemerintah mewajibkan program inklusi di Sekolah dasar?

“Pemerintah mewajibkan setiap sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) hanya saja sekolah tidak difasilitasi dengan sarana dan prasana yang mendukung. Idealnya 1 guru menangani 3 anak yang menderita ABK, namun di sekolah kami hanya ada 3 GPK. Dan ketiganya berstatus guru honorer. Tentu ini sangat memberatkan kami selaku pengelola sekolah. Satu sisi kami harus mengikuti aturan pemerintah, sisi lain kami masih kesulitan dalam hal pengelolaan ABK.”(Wawancara Kepala Sekolah)

Menurut kepala sekolah dan GPK, warga sekitar yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut sangat rendah pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Seringkali orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya salah satu ABK yang tidak bisa disamakan dengan anak-anak lain. Kepala sekolah memaklumi karena Sebagian besar warga sekitar yang menyekolahkan anaknya tersebut tergolong masyarakat menengah kebawah yang rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan pekerja serabutan. Untuk itu pada saat penerimaan peserta didik baru, sekolah mengharuskan orang tua membawa anaknya untuk di wawancara dan diobservasi secara mendalam oleh tim guru dan psikologis. Apakah semua orang tua paham kondisi anaknya?

“Seringkali orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tidak tahu bahwa anak mereka termasuk yang mempunyai kebutuhan khusus. Ada juga orang tua yang sudah mengetahui namun beranggapan bahwa anaknya menderita autis, padahal sebenarnya anaknya menderita tuna grahita atau down syndrome. Untuk itu kami setiap tahunnya menyiapkan tes psikologis agar kami bisa mengetahui apakah anak tersebut normal atau ABK. Sebagian besar orang tua menerima jika anak mereka mempunyai kebutuhan khusus”(wawancara Kepala Sekolah).

Bagaimana system penerimaan siswa baru ABK di sekolah inklusif? bagaimana persyaratan, dan prosedurnya? Apakah diberlakukan seleksi admisnitratif dan akademik kepada calon siswa ABK? apakah ada asesmen? Kapan asesmen diberlakukan? Dan siapa yang melakukannya?

System penerimaan siswa baru di sekolah ini dilakukan dengan cara diseleksi diawal, kami melakukan tes penilaian terhadap anak yang mendaftar. Jika ada siswa terindikasi tergolong ABK maka pihak sekolah bekerjasama dengan psikolog anak tersebut tergolong kategori apa, karena sekolah hanya menerima siswa

ABK kategori tunagrahita (sedang dan ringan) dan anak downsyndrom sesuai dengan tenaga pengajar yang ada. (Wawancara Kepala Sekolah)

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS

Nomor : 028/YA/YAY-HIN/12/2021
 Nama : **LINTANG ANTIKA** (Perempuan)
 Tgl.Lahir : 22 Mei 2011
 Tgl. Pemeriksaan : 2 Desember 2021
 Usia : 10 tahun 6 bulan
 Pendidikan : Kelas 4 SDN 01 Bojongsari
 Tujuan Pemeriksaan : Evaluasi Psikologis

ASPEK PSIKOLOGIS		PENILAIAN						
ASPEK KEMAMPUAN DASAR	1	2	3	4	5	6	7	
1. Kecerdasan Umum		X						
2. Daya Tangkap			X					
3. Daya Ingat		X						
4. Penalaran Verbal				X				
5. Penalaran Non Verbal		X						
6. Kemampuan Numerik		X						
7. Pengetahuan Umum		X						
8. Pemahaman Situasi Sosial		X						
9. Koordinasi Visual Motorik				X				
ASPEK SIKAP DAN CARA KERJA								
1. Konsentrasi		X						
2. Ketelitian				X				
3. Sistematis Kerja		X						
4. Daya Tahan			X					
5. Kecepatan					X			
ASPEK KEPERIBADIAN								
1. Penyesuaian Diri				X				
2. Kepercayaan Diri				X				
3. Kematangan Emosi			X					

*Keterangan : 1-2 = kurang 3-4-5 = cukup 6-7 = baik

Taraf Kecerdasan (IQ) : 89
 Taraf Kecerdasan Verbal : 90
 Taraf Kecerdasan Performance : 90

Gambar 1. Hasil Penilaian Psikologis pada saat pemeriksaan awal

Dari gambar 1 dapat dilihat, ada beberapa aspek psikologis yang dinilai, 1) Aspek Kemampuan dasar; Kemampuan dasar tentu dimiliki oleh setiap anak, anak normal tentu akan mendapatkan nilai 5 s.d 7 sesuai dengan kecerdasannya, namun contoh pada gambar diatas menunjukkan penilaian dominan di angka 2 ini menunjukkan bahwa anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. 2) Aspek sikap dan cara kerja; Secara kasat mata sikap dan cara kerja anak normal tentu akan kelihatan, sama seperti hanya penilaian aspek kemampuan dasar angka normal pada penilaian ini adalah 5 s.d 7. 3) Aspek kepribadian; Aspek yang paling terlihat pada anak berkebutuhan khusus biasanya pada ketenangan emosi, contoh salah satu anak yang berkebutuhan khusus diatas menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi masih rendah. Setiap siswa yang mendaftar masuk dilakukan tes evaluasi untuk didiagnosis oleh psikolog. Pada gambar 2 disajikan salah satu hasil penilaian awal.

Kecerdasan	
b. Sedang	
1. Memiliki IQ 25- 50 (dari wisc)	✓
2. Tidak dapat berpikir abstrak	✓
3. Hanya mampu membaca kalimat tunggal	
4. Mengalami kesulitan walaupun dalam hitung sederhana	
Perilaku Adaptif	
1. Perkembangan Interaksi dan Komunikasinya terlambat	
2. Mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkunganyang baru (penyesuaian diri)	
3. Kurang mampu untuk mengurus diri sendiri	
Kecerdasan	
c. Berat	
1. Memiliki IQ 25- ke bawah	
2. Hanya mampu membaca satu kata	
3. Sama sekali tidak dapat berfikir secara abstrak	
Perilaku Adaptif	
1. Tidak dapat melakukan kontak social	
2. Tidak mampu mengurus diri sendiri	
3. Akan banyak tergantung pada bantuan orang lain	

No.	Gejala Yang Dialami	Ket
1.	Polio	
	a. Jari-jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam	✓
	b. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap /tidak sempurna/lebih kecil dari biasanya	✓
	c. Terdapat cacat pada alat gerak	✓
	d. Kesulitan dalam melakukan gerakan (tidak sempurna,tidak lentur dan tidak terkendali	✓
	e. Anggota gerak kaku,lemah ,lumpuh dan layu	✓
2.	Cerebral Palsy (CP)	
	a. Jari-jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam	✓
	b. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap /tidak sempurna/lebih kecil dari biasanya	✓
	c. Terdapat cacat pada alat gerak	✓
	d. Kesulitan saat berdiri, berjalan, duduk, berpindah tempat	✓
	e. Kesulitan dalam melakukan gerakan (tidak sempurna,tidak lentur dan tidak terkendali	✓
	f. Anggota gerak kaku,lemah ,lumpuh dan layu	✓
	g. Anggota tubuh tidak lengkap atau tidak tumbuh sempurna	✓
	h. Menggunakan alat bantu untuk bergerak; kursi roda/kruk	✓
	i. Kesulitan berbicara karena kelainan otot mulut	✓
	j. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam	✓
k. Gerak yang ditampilkan kekakuan atau tremor	✓	

Gambar 2. Hasil Penilaian Psikologis pada saat pemeriksaan awal aspek kecerdasan

Setelah melakukan observasi, kemudian pihak sekolah menentukan kriteria ABK yang diterima. Sekolah hanya menerima ABK kategori ADHD, keterlambatan belajar (*Slow learner*), gangguan pendengaran, dan tuna grahita sedang dan ringan. Untuk kategori ABK dengan gangguan tuna Netra, autisme, dan tuna grahita berat sekolah tidak bisa menerima dikarenakan tidak adanya GPK yang ahli dalam bidang tersebut. Jika semua ABK diterima dikhawatirkan pembelajaran tidak dapat terlaksana sehingga mengganggu siswa yang lain. Apakah GPK dan sarpras yang mengajar di sekolah sudah memenuhi standar?

“Selain GPK yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan, fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah ini sangat terbatas. Hanya ada sarana belajar untuk ABK tuna grahita dan down sindrom. Jika kami menerima siswa dengan kebutuhan khusus diluar itu, kami tidak menjamin pembelajaran berjalan dengan baik” (Wawancara Kepala Sekolah)

Kendala penyelenggaraan Pendidikan inklusi di sekolah dasar terbentur dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang kurang mendukung. Upaya pemerintah agar semua anak Indonesia menerima Pendidikan yang layak tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus tentu harus disiapkan dengan matang materi maupun fasilitas. Jika melihat kondisi salah satu sekolah yang peneliti observasi, tentu banyak sekali hal-hal yang perlu ditambahkan, seperti tenaga pengajar, media pembelajaran khusus, fasilitas ruangan dan sebagainya.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus tentu tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal, perlu ada treatment dan kurikulum yang berbeda. Jika kurikulum disamaratakan dengan siswa lain tentu tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Apa Kurikulum yang digunakan dalam mengajar ABK di kelas inklusif? kurikulum standar/nasional atau kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh sekolah/guru?

Kurikulum yang diterapkan pada siswa yang berkebutuhan khusus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru yang dikelasnya terdapat ABK maka harus membuat RPP, media dan penilaian yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak ada kurikulum standar yang diberikan pemerintah untuk program inklusi di sekolah dasar. Jika memang siswa ABK yang ada pada kategori sedang maka siswa diserahkan ke GPK untuk selanjutnya diberikan treatment. (Wawancara GPK).

3.	Tunagrahita/ anak lamban belajar	Gradasi kubus, gradasi balok, silinder, manara gelang, kotak silinder, multi indra, puzzle binatang, puzzle konstruksi, puzzle bola, boks sortor warna, geometri tiga dimensi, papan geometri, konsentrasi mekanik, puzzle set, abacus, papan bilangan, kotak bilangan, sikat gigi, dresing prame set, pias huruf, pias kalimat, alphabet fibre box, bak pasir, papan keseimbangan, power raider,
----	----------------------------------	---

Gambar 3. Media yang digunakan untuk ABK kategori Tunagrahita

Apakah dibuatkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) khusus untuk ABK?

Pada dasarnya anak ABK yang belajar di sekolah kami hanya untuk melatih sikap dan motoric. Sedangkan kognitif anak ABK Sebagian besar sama, kemampuan mereka hanya sampai materi kelas 5. Untuk memahami materi kelas 1 saja ABK butuh waktu 2-3 tahun, jadi untuk kategori kelulusan kami tidak menerapkan itu. Hanya ada kategori penilaian tersendiri. (Wawancara GPK).

Bagaimana dengan Sumber belajar untuk ABK? Sama atau beda?

Sumber belajar yang kami pakai untuk siswa ABK kami kembangkan sendiri. Guru kelas dibantu dengan GPK menyiapkan sumber belajar yang relevan digunakan untuk ABK agar tujuan pembelajaran tercapai. (Wawancara ABK)

MODEL MODIFIKASI BAHAN AJAR

Pendidikan Inklusif Di Sekolah dasar

Jenis Kekhususan : Tuna Grahita Ringan

Model Modifikasi : Matematika

Kelas : 3 /I

A. Standar Kopetensi : Siswa mampu menjumlahkan bilangan 3 angka.

B. Kompetensi dasar : Menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara susun ke bawah.

C. Indikator : - Menjumlah dengan teknik menyimpan

NO	Jenis ABK	Bahan Ajar	Modifikasi Bahan Ajar
1	Tunagrahita/Lamban Belajar	1. 479 876 ----- +	Bahan ajar dimodifikasi dengan menurunkan bobot soal. 1. 124 237 ----- +

Gambar 3. Modifikasi bahan ajar

Apakah ada GPK di sekolah bapak/ibu? Apa peran dan tugas ABK?

Seperti yang sudah disebutkan diawal, GPK di sekolah kami ada 3 orang, ketiganya merupakan honorer. Di sekolah kami terdapat lebih kurang 2 sampai dengan 3 ABK, jadi total keseluruhan sekitar 18 siswa berkebutuhan khusus. Ini tentu menjadi PR besar bagi guru kelas, sehingga peran GPK adalah mendampingi guru yang memang tidak bisa dikendalikan. Kemudian 1 guru stand by di ruangan yang memang disiapkan untuk ABK, guru tersebut yang memberikan treatment kepada siswa ABK. Siswa yang mendapatkan treatment bergiliran, setiap hari 2-3 siswa ABK.

Apa kesulitan atau kendala yang anda alami terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan di sekolah inklusif?

Jika berbicara kendala, maka banyak sekali kendala yang kami hadapi. Terutama dari rasio GPK yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, idealnya 1 GPK menangani 2 ABK namun di sekolah kami GPK bisa menangani 5-6 ABK. Support pemerintah terhadap GPK masih tidak jelas, saya mengabdikan di sekolah ini sudah 12 tahun namun status saya masih belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Setiap penerimaan CPNS di lingkungan kemendikbud tidak ada slot khusus untuk Guru pendamping khusus. Harapan kami tentu tidak besar, kami hanya ingin ada kejelasan dari pemerintah bagi GPK. (Wawancara GPK)

3. Proses Penilaian Pembelajaran dan Proses Kelulusan

Penilaian merupakan salah satu instrument dalam pembelajaran selain bahan ajar, media dan rencana pembelajaran. Pada prakteknya tentu proses penilaian anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak normal. Lalu bagaimana penilaian untuk siswa ABK di sekolah inklusif? Sama atau beda? Termasuk ujian nasional?

Penilaian yang digunakan untuk siswa ABK di sekolah inklusif kami tidak samakan dengan siswa normal lainnya. Jika siswa normal dilakukan penilaian sesuai dengan silabus yang diberikan pemerintah, maka untuk

siswa ABK standarnya diturunkan. Guru menyesuaikan pula dengan kriteria siswa ABK yang ada dikelas. Begitupun dengan ujian nasional, ada soal tersendiri yang disiapkan sekolah untuk siswa ABK. (Wawancara GPK)

Bagaimana system kenaikan kelas untuk siswa ABK di sekolah Inklusif?

Pada dasarnya pada kurikulum 2013 tidak ada siswa yang tinggal kelas, begitupun dengan siswa ABK. Hanya di sekolah yang kami Kelola, siswa ABK bisa saja tidak naik kelas karena beberapa hal, diantaranya: Anak tidak mengikuti proses pembelajaran, misal siswa sering tidak hadir dan kondisi siswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Tentu sebelumnya kami lakukan pendekatan terhadap siswa ABK tersebut. (Wawancara GPK)

Bagaimana raport dan Ijazahnya?

Ada raport khusus yang dipakai untuk penilaian siswa ABK. Untuk Ijazah kita samakan dengan siswa normal, hanya nomor seri yang dipakai untuk membedakan siswa ABK dengan siswa normal. Sebingga jika siswa ABK ingin melanjutkan Pendidikan tentu tidak semua sekolah menerima mereka. Bisa dilihat contoh raport siswa ABK yang ada di sekolah kami.

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK

Unsur yang Dinilai	B	C	K
1. Orientasi			
Waktu			√
Tempat	√		
Orang	√		
2. Tanggung Jawab			√
3. Motivasi belajar		√	
4. Memory			
Memory jangka pendek		√	
Memory jangka panjang			√
5. Bekerjasama dalam kelas		√	
6. Mendengar dan memperhatikan instruksi guru		√	
7. Mampu bersosialisasi	√		
8. Kemampuan menulis dasar			
Menebalkan garis lurus, miring, bulat			√
Menebalkan angka		√	
9. Ketrampilan menggunting			
Memegang gunting			√
Menggunting lurus			√
Menggunting bentuk			√
Melepas sepatu		√	
10. Permainan			
Mewamai		√	

Gambar 5. Raport penilaian siswa ABK

Melihat raport hasil penilaian siswa ABK diatas, penilaian yang digunakan lebih pada afektif dan motoric siswa, karena menurut GPK yang mengajar kemampuan kognitif siswa ABK tidak bisa diukur. Kemampuan kognitif siswa ABK maksimal hanya sampai kelas 4, jadi lebih ditekankan pada proses penilaian gerak dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Dari hasil penelitian di atas, praktek program inklusi disalah satu sekolah di daerah Depok secara keseluruhan sudah baik. Mulai dari proses penerimaan peserta didik baru yang melibatkan psikologis

untuk mendiagnosis anak. Sebagian besar wali siswa yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tidak begitu paham dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Orang tua siswa menganggap semua anak berkebutuhan khusus itu dalam kategori autisme, sehingga mereka tidak paham bagaimana cara menanganinya. Orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, agar anaknya bisa bersosialisasi secara normal dengan anak-anak lainnya. Idelanya memang anak berkebutuhan khusus jika di sekolahkan harus ada *Pseudo teacher*, namun tentu ada biaya besar yang dikeluarkan. Sedangkan orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah yang peneliti observasi sebagian besar menengah ke bawah yang berprofesi sebagai buruh pabrik dan ibu rumah tangga.

Pada proses pembelajaran, Kerjasama guru kelas dan guru pendamping khusus (GPK) sangat penting. Guru kelas menyiapkan bahan ajar dan media yang dikembangkan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik tanpa harus mengganggu siswa yang lain. Jumlah GPK yang berada di sekolah hanya 3 orang, sedangkan jumlah ABK setiap kelasnya antara 2-3 siswa. Tentu ini tidak sebanding dengan kebutuhan siswa terhadap GPK. Namun kepala sekolah dan kordinator GPK mensiasatinya dengan cara bergilir dalam melakukan bimbingan.

Selanjutnya dari segi penilaian, sekolah yang kami observasi sudah baik, yakni penilaian dilakukan lebih banyak pada aspek afektif dan psikomotorik. Karena pada dasarnya ABK harus terus dilatih sosialisasi dengan temannya atau lingkungan sekitar (Engelbrecht, 2006a). Proses penilaian akhir, tentu tidak disamakan dengan anak-anak yang lain. Ada soal-soal khusus yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa ABK. Laporan yang diberikan dibedakan sesuai dari penjelasan pada hasil penelitian, namun ijazah yang diberikan sama hanya nomor seri untuk siswa ABK dibedakan.

Menurut Operti, dalam melaksanakan Pendidikan khusus terdapat beberapa konsep, yakni Pendidikan berkebutuhan khusus (*Special need education*), Konsep Integrasi (*integration*), dan Konsep penyertaan (*inclusion*) (Operti & Belalcázar, 2008). Secara tradisional dan bahkan saat ini di berbagai kawasan dunia—seperti Eropa Timur dan Tenggara, serta Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) dan sebagian besar Asia, konsep dan praktik pendidikan inklusif sebagian besar telah terbatas pada siswa yang dikategorikan berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki cacat fisik dan/atau mental, serta pengungsi. Konsep integrasi mengemuka pada tahun 1980-an, sebagai alternatif kurikulum dan model sekolah berkebutuhan khusus, tujuannya adalah untuk menempatkan siswa yang teridentifikasi berkebutuhan khusus di sekolah umum. Pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai prinsip panduan untuk mencapai tingkat integrasi sekolah yang wajar bagi semua siswa. Dalam konteks visi integrasi yang lebih luas, pendidikan inklusif menyiratkan konsepsi dan penerapan berbagai strategi pembelajaran untuk merespons secara tepat keragaman peserta didik.

Sebagai kontribusi untuk pembahasan pendekatan pedagogis untuk pendidikan inklusif, (David Skidmore, 2004) menarik perhatian pada perbedaan antara pedagogi penyimpangan dan inklusi, mencatat lima aspek berikut: Pembelajaran siswa, kegagalan sekolah, Tanggapan sekolah, Keahlian guru, dan Model kurikulum.

KESIMPULAN

Praktik Pendidikan inklusi di sekolah yang kami observasi sudah baik, hanya saja masalah yang paling mendasar adalah jumlah guru pendamping khusus (GPK) yang tidak sesuai dengan jumlah rasion siswa ABK. Jika melihat kasusnya mungkin hamper sama di setiap sekolah yang menerapkan program inklusi ini. Namun jika melihat proses penerimaan dan seleksi yang cukup ketat yang dilakukan GPK dengan psikologis; pelaksanaan pembelajaran dimana guru harus menyiapkan bahan ajar dan media khusus untuk siswa ABK; dan penilaian khusus untuk siswa ABK, peneliti meyakini program Pendidikan inklusi yang dilaksanakan di sekolah yang kami observasi sudah berjalan dengan baik. Meskipun sudah baik, tentunya pelaksanaan program Pendidikan inklusi harus didukung oleh semua pihak terutama dukungan pemerintah dengan melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana belajar siswa ABK, dan tentunya peran orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Acedo, C. (2011). Preparing teachers for inclusive education. In *Prospects* (Vol. 41, Issue 3, pp. 301–302). <https://doi.org/10.1007/s11125-011-9198-2>
- Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges. *Prospects*, 49(3–4), 123–134. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09506-w>
- Amr, M. (2011). Teacher education for inclusive education in the Arab world: The case of Jordan. *Prospects*, 41(3), 399–413. <https://doi.org/10.1007/s11125-011-9203-9>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (n.d.). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 223–227.
- David Skidmore. (2004). *Inclusion: The dynamic of school development*. McGraw-Hill Education.
- Dignath, C., Rimm-Kaufman, S., van Ewijk, R., & Kunter, M. (2022). Teachers' Beliefs About Inclusive Education and Insights on What Contributes to Those Beliefs: a Meta-analytical Study. *Educational Psychology Review*. <https://doi.org/10.1007/s10648-022-09695-0>
- Donnelly, V., & Watkins, A. (2011). Teacher education for inclusion in Europe. In *Prospects* (Vol. 41, Issue 3, pp. 341–353). <https://doi.org/10.1007/s11125-011-9199-1>
- Engelbrecht, P. (2006a). The implementation of inclusive education in South Africa after ten years of democracy. *Uropean Journal of Psychology of Education*, XXI(3), 253–264.
- Engelbrecht, P. (2006b). The implementation of inclusive education in South Africa after ten years of democracy. *Uropean Journal of Psychology of Education*, XXI(3), 253–264.
- Kellmer Pringle, M. L. (n.d.). *The Study Of Exceptional Children-The Work Of The Remedial Education Centre Of Birmingham University*.
- Khairuddin. (2020). Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tazkiya*, IX(1), 82–104. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya>
- Lanham, K. Yu. (2014). The implementation of inclusive education in Beijing. In *Front Educ* (Vol. 9, Issue 3, pp. 461–463).
- Marope, P. T. M. (2017). Advancing inclusive and quality education through human rights education. In *Prospects* (Vol. 47, Issues 1–2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11125-018-9430-4>
- Novrizaldi. (2022). *Pemerintah Wajib Penubi Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*.
- Opertti, R., & Belalcázar, C. (2008). Trends in inclusive education at regional and interregional levels: Issues and challenges. *Prospects*, 38(1), 113–135. <https://doi.org/10.1007/s11125-008-9062-1>
- Patera, E. (2021). Inclusive Lectures: How Often Do We See Them Across Anatomy and Medical Education? In *Medical Science Educator* (Vol. 31, Issue 6, p. 2137). Springer. <https://doi.org/10.1007/s40670-021-01411-x>
- Perrin, A. L., Jury, M., & Desombre, C. (2021). Are teachers' personal values related to their attitudes toward inclusive education? A correlational study correlational study. *Social Psychology of Education*, 24(4), 1085–1104. <https://doi.org/10.1007/s11218-021-09646-7>
- Praptiningrum, N. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 32–39.
- Rahim, A. (2016). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua. *Tribayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 68–71.

UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.). Departement Pendidikan dan Kebudayaan.

Ydo, Y. (2020). Inclusive education: Global priority, collective responsibility. In *Prospects* (Vol. 49, Issues 3–4, pp. 97–101). Springer Science and Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09520-y>